



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER

UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TOTO IFRIANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 497878

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	3.350.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 535 m2/200 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, WARISAN Rp. 1.100.000.000		
2.	Tanah dan Bangunan Seluas 1298 m2/54 m2 di KAB / KOTA PENAJAM PASER UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000		
3.	Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/42 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	113.000.000
1.	MOBIL, SUZUKI JB 424-GRAND VITARA A/T / JEEP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2.	MOTOR, HONDA CBR 250 RAB / SPD-MTR SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
3.	MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS / SPD-MTR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
4.	MOTOR, YAMAHA BEJ AT / SPD-MTR/SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	61.000.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	107.544.699
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	3.631.544.699



III. HUTANG

Rp. 320.013.400

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.311.531.299

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.